

**PENGARUH AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT,
KEPEMIMPINAN, TRANSPARANSI ADD, DAN KEBIJAKAN DESA
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**
(Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh

Kumala Faiza Amalia

NPM. 21801082216



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

2022

ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat, kepemimpinan, transparansi alokasi dana desa, dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun variabel bebas pada penelitian ini adalah akuntabilitas, partisipasi masyarakat, kepemimpinan, transparansi add, dan kebijakan desa. sedangkan untuk variabel terikatnya adalah kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Se-Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan kuisisioner yang dibagikan kepada responden yang berada di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Muncar. Jenis dari penelitian ini yaitu menggunakan penelitian korelasional dan sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil analisis terhadap 100 orang responden menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 26 menunjukkan bahwa akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi alokasi dana desa, kepemimpinan, dan kebijakan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

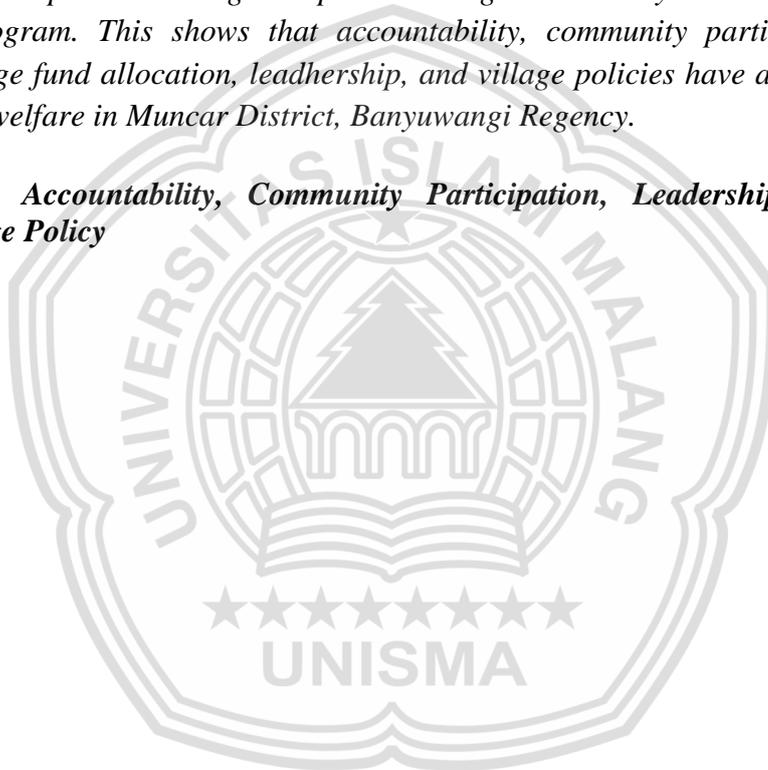
Kata Kunci : Kesejahteraan, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Kepemimpinan, Transparansi ADD, Kebijakan Desa



ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of accountability, community participation, leadership, transparency of village fund allocation, and village policies on community welfare. The independent variables in this study are accountability, community participation, leadership, add transparency, and village policies. while for the dependent variable is the welfare of society. This research was conducted in all villages in the Muncar sub-district, Banyuwangi district by using a questionnaire distributed to respondents in the Muncar sub-district government. The type of this research is using correlational research and the sample in this study was obtained using purposive sampling technique. The results of the analysis of 100 respondents using multiple linear regression analysis with the help of the SPSS 26 program. This shows that accountability, community participation, transparency of village fund allocation, leadership, and village policies have a positive effect on community welfare in Muncar District, Banyuwangi Regency.

Keywords: *Welfare, Accountability, Community Participation, Leadership, ADD Transparency, Village Policy*



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik di Negara Indonesia semakin meningkat perkembangannya karena adanya pelaksanaan kebijakan pemerintah yaitu otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Maraknya globalisasi menuntut daya saing di setiap pemerintahan daerah untuk lebih maju dengan mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk meningkatkan kehidupan masyarakat sejahtera. Dalam mencapai hal tersebut kebijakan pemerintah menitikberatkan kepada pemerintahan tingkat daerah sampai tingkat desa.

Menurut konstitusi Undang-Undang 1945 menjelaskan bahwa desa atau kesatuan masyarakat merupakan hukum adat atau dengan istilah lain adalah diatur secara khusus. peran UU Desa sangatlah penting bagi masyarakat desa karena digunakan sebagai penyokong keberhasilan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera dan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menetapkan bahwa desa memiliki kewenangan dalam mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan hak cipta dan hak tradisional, mengurus kepentingan masyarakat serta dalam mencapai terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini diharapkan pemerintahan desa menjadi independen, professional, efektif, transparan serta bertanggung jawab

sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memecahkan permasalahan kesenjangan pembangunan.

Desa merupakan elemen paling bawah dalam program kedaulatan di Indonesia. Latar belakang suatu desa merupakan elemen yang penting yaitu kontrol warga negara Indonesia kebanyakan berasal dari desa dan berlimpah masalah yang hanya mampu dihadapi dari elemen kawasan perdesaan. sehingga untuk mencari indikator yang tepat dalam menimbang apakah warga itu makmur atau tidak, layak atau tidak maka, desa adalah elemen yang paling signifikan untuk dianalisis, Wahyuddin (2016)

Menurut Undang-Undang nomor 43 tahun 2014 tentang desa menetapkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, dengan alokasi dana desa yang diperoleh dari dana perimbangan setelah dikurangi belanja pegawai desa dengan minimal 10% yang digunakan oleh desa. Dengan adanya UU ini bermaksud untuk mendukung program pembangunan desa yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Akan tetapi, penyelewengan alokasi dana desa masih sangat sering terjadi menimbulkan masalah yang dilakukan oleh oknum-oknum yang telah dipercaya oleh masyarakat dalam melakukan perkembangan dan kemajuan desanya. Dilihat dari besaran jumlah anggaran yang dialokasikan kepada desa lewat alokasi dana desa cukup besar, maka muncul suatu pertanyaan apakah desa beserta anggotanya mampu mewujudkan pengelolaan atau pengendalian anggaran yang tertera dengan baik. Dalam

hal ini menimbang bahwa sebelumnya desa menjalankan pembangunan dengan bantuan anggaran keuangan yang terbatas dan pengelolaannya yang masih belum baik atau sentralis oleh satuan elemen pemerintahan, namun, setelah diberlakukannya kebijakan alokasi dana desa, tiap-tiap desa memperoleh distribusi anggaran yang lumayan besar dan pengendaliannya dilakukan secara independen untuk menjadikan setiap desa agar menjadi lebih baik dan mampu memajukan kesejahteraan masyarakat (Kholmi,2016).

Untuk menghindari terjadinya penyelewengan pada saat pengendalian alokasi dana desa, pemerintah desa dituntut untuk akuntabilitas publik, memperhatikan partisipasi dari masyarakat, serta kepemimpinan berperan penting dalam menjalankan beragam aktivitas atau tindakan, masyarakat juga berhak mengetahui rencana dasar yang akan dijalankan oleh instansi atau perangkat desa. Hal ini bertujuan agar tidak adanya rasa saling ketidakpedulian antara masyarakat dengan perangkat desa dalam menjalankan pengendalian alokasi dana desa maupun pembangunan desa.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menerangkan keberhasilan kinerja dan untuk meminta keterangan pertanggungjawaban kepada seseorang atau badan yang berwenang (Simbolon, 2006:56). Menurut Waluyo (2009) akuntabilitas mencakup keterbukaan kontribusi informasi keuangan terhadap masyarakat dan pemakai sehingga masyarakat maupun

pemakai dapat mengukur kewajiban pemerintah atas segala kegiatan yang dilaksanakan. Akuntabilitas juga digunakan usaha pemerintah untuk mewujudkan rencana rancangan pemerintah untuk menjadi yang lebih baik dengan berdasarkan *good governance*. *good governance* adalah rencana pemerintahan yang teguh dan konsisten, serta efektif dan efisien. Sehingga diharapkan mampu menjalankan keserasian integritas produktif yang bermanfaat diantaranya dengan partisipasi masyarakat, wilayah, dan bagian swasta. Maka akuntabilitas diharapkan mampu menyempurnakan status juga kinerja dari perangkat pemerintah agar menjadi kedaulatan pemerintah yang terbuka dan fokus terhadap kebutuhan masyarakat.

Partisipasi yaitu keterlibatan seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan atau aktivitas, Mubyarto (1984:35). Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting terhadap peningkatan pemberdayaan masyarakat yang belum seluruhnya dijalankan oleh pemerintahan. Persepsi masyarakat juga masih kurang dalam kesadaran atau pemahaman bahwa partisipasi dari mereka (masyarakat) sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program yang dibuat oleh pemerintahan desa. Persepsi merupakan pemahaman mengenai tujuan, peristiwa, serta hubungan mengenai tata cara mengambil keputusan informasi dan menguraikan perintah serta persepsi suatu pemikiran tentang keabsahan kepercayaan terhadap sesuatu, Rakhmat (2001). Salah satu yang menjadi faktor sangat penting terjadinya korupsi yaitu kurangnya keikutsertaan atau partisipasi dari masyarakat dalam melaksanakan proses penggunaan anggaran dana

desa. Oleh karena itu partisipasi masyarakat merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari pengalokasian dana desa

Sedangkan kepemimpinan adalah ketahanan dasar untuk memberikan dorongan dan menyalurkan suatu organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama, Andrew (2002). Kepemimpinan menjadi peran penting bagi desa. karena desa yang baik dimulai dari pemimpin yang baik. Dalam penelitian yang dilakukan Ardana *et al* (2011) Menjelaskan gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku yang dapat dipengaruhi dengan salah satu faktor diantaranya yaitu nilai asumsi, harapan, persepsi dan sikap dalam memimpin. Gaya kepemimpinan ini dapat ditunjukkan oleh seorang pemimpin yang terpengaruh dari karyawan atau orang lain. Salah satu contoh pemimpin yang baik yaitu kepemimpinan yang terbuka atau transparan, transparan terhadap seluruh aktivitas atau kegiatan, dengan demikian seorang pemimpin pemerintah dengan masyarakat desa dapat mewujudkan pengendalian yang baik.

Menurut Permendagri 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan secara partisipatif kepada masyarakat atas kinerja pemerintah agar penggunaan sumber daya bisa terpenuhi dengan sesuai dengan peraturan pemerintah. Putra & Rasmini (2019) menyimpulkan transparansi memiliki artian yaitu setiap warga masyarakat memiliki hak dan peluang yang sama untuk mengetahui tata kelola anggaran yang melibatkan kebutuhan dan harapan masyarakat terutama dalam pemenuhan harapan-

harapan masyarakat dalam melakukan pengelolaan dana desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Namun, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari penerapan kebijakan desa yang telah ditentukan.

Pangayouw & Kurniawati (2017) menyatakan kebijakan desa yaitu salah satu produk perundang-undangan berskala kecil yang didalamnya menjelaskan tentang kewajiban dan program-program. Menurut Elvina & Musdhalifah (2019) Agar tercapainya sebuah cita-cita atau tujuan pemerintahan desa, maka dalam pengimplementasian kebijakan desa harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintahan desa dengan masyarakat desa. Prinsip dari pengimplementasian kebijakan desa yaitu cara supaya sebuah kebijakan desa dapat mewujudkan tujuan yang telah dibuat.

Menurut Fahri (2017) program pembangunan desa masih belum efektif hal ini disebabkan masih ditemukannya desa-desa dalam penggunaan alokasi dana desa tidak sejalan dengan kebijakan desa yang telah dibuat dalam peraturan pemerintah desa, pembangunan daerah tertinggal dan masih belum tersedianya peraturan dari pemerintah desa mengenai peraturan pengalokasian dana desa. Program-program pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat sering terjadi kegagalan yaitu pada saat melakukan persiapan, penerapan, dan evaluasi tidak adanya keterlibatan dari masyarakat (Saputra, 2016)

Nafidah & Suryaningtyas meneliti tentang “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat” menunjukkan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sudah berjalan dengan baik dengan dilihat dari sisi teknis maupun administrasi. Bersumber pada bukti adanya pertanggungjawaban secara terbuka dan akuntabel. Persiapan, penerapan, dan pertanggungjawaban telah dilakukan oleh pemerintahan desa seimbang dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Dura (2016) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa sudah digunakan dengan tepat sehingga mampu mengakomodasikan pembiayaan terkait program pemberdayaan rakyat yang akan berpengaruh baik terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pada penelitiannya Lombogia *et al* (2018) menyatakan bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara relevan terhadap keefektifan penerapan program pembangunan. Artinya partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penunjang dalam meningkatkan efektivitas penerapan pembangunan desa dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya, serta peneliti bertujuan untuk melakukan kembali pengujian hipotesis dari penelitian sebelumnya yaitu dengan mengubah data yang

digunakan sebagai objek penelitian dan dengan kondisi lapangan yang berbeda. Maka lebih lengkapnya peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Kepemimpinan, Transparansi ADD dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”**

1.2 Rumusan Masalah

Maka dilihat dari latar belakang diatas, dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Kepemimpinan, Transparansi ADD, dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat?
2. Bagaimanakah Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kesejahteraan Masyarakat?
3. Bagaimanakah Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat?
4. Bagaimanakah Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat?
5. Bagaimanakah Pengaruh Transparansi ADD Terhadap Kesejahteraan Masyarakat?
6. Bagaimanakah Pengaruh Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Rumusan masalah diatas, dapat dijelaskan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Kepemimpinan, Transparansi ADD, dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
4. Untuk Mengetahui Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
5. Untuk Mengetahui Pengaruh Transparansi ADD Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
6. Untuk Mengetahui Pengaruh Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat dikontribusikan bagi peneliti adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan dukungan dan memberi rujukan bagi peneliti

selanjutnya serta dapat dijadikan sebuah acuan bagi penelitian selanjutnya yang akan meneliti tentang kesejahteraan masyarakat

b. Bagi Bidang Ilmu

Bermanfaat bagi bidang ilmu akuntansi sektor publik dan akuntansi dana desa sebagai bahan referensi pelengkap literasi yang akan digunakan bagi pihak yang membutuhkan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi dan dapat digunakan juga sebagai salah satu faktor sarana untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa selanjutnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan dana desa dan untuk mengetahui kinerja pemerintah desa dalam mewujudkan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, kepemimpinan oleh pemerintah desa.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai alat pengujian hipotesis yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel akuntabilitas, partisipasi masyarakat, kepemimpinan, transparansi ADD dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat pada desa yang ada di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 100 responden. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa, variabel akuntabilitas, partisipasi masyarakat, kepemimpinan, transparansi ADD dan kebijakan desa secara simultan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Berdasarkan hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa, variabel akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Berdasarkan hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa, variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
4. Berdasarkan hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa, variabel kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

5. Berdasarkan hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa, variabel transparansi ADD berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
6. Berdasarkan hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa, variabel kebijakan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

5.2 Keterbatasan

Dalam penelitian ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan ilmiah, namun masih terdapat keterbatasan dalam penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Data pada penelitian ini berasal dari responden dengan menggunakan metode penyebaran kuesioner secara online melalui google form yang kemungkinan berpengaruh terhadap validitas hasil dan persepsi responden belum tentu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya
2. Dalam penelitian ini, responden tokoh masyarakat masih kurang memahami teknologi, sehingga pada saat pengisian kuesioner dilakukan secara langsung dan berdampingan.
3. Variabel yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat pada penelitian ini hanya menggunakan lima variabel, sedangkan masih banyak variabel lain yang mampu mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dan memperoleh kesimpulan, maka peneliti memberikan saran adalah sebagai berikut :

1. Selain menggunakan instrumen kuesioner dengan menggunakan *google form* maka, bisa ditambahkan dengan melakukan secara tertulis dan wawancara
2. Penulis berharap bagi peneliti selanjutnya, sebelum melakukan penelitian hendaknya melakukan sosialisasi terlebih dahulu terutama pada saat penyebaran kuesioner dan melakukan pendampingan saat proses pengisian kuesioner
3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya menambahkan variabel lain dalam melakukan penelitiannya supaya dapat memberikan temuan yang baru. Seperti yang telah disampaikan oleh Riza, (2019) faktor kesejahteraan masyarakat, yaitu: sumber daya atau potensi yang telah tersedia dan cukup, kemudahan dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Rusdiana & Moch.Irfan. 2014. Sistem Informasi Manajemen. Bandung : Pustaka Setia.
- Ach. Wazir Ws., et al., ed. (1999). Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat. Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project.
- Adi, Isbandi Rukminto. (2005). Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. FISIP UI PRESS.
- Afrijal. (2018). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Bandar Lampung : Universitas Mitra Indonesia
- Andrew JD. 2002. The Complete Ideal's Guides: Leadership. Ed ke-2. Wibowo Tri BS, penerjemah. Jakarta (ID): Prenada Media.
- Ardana, I komang dkk. 2011, Manajemen Sumber Daya Manusia, Denpasar: Graha Ilmu.
- Ardiyanti, Rika. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009) Diakses dari <http://eprints.walisongo.ac.id>
- Arep, Ishak, dkk. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Universitas Trisakti
- Azwar. (2017). Metode penelitian psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Badruddin, 2012. Teori Indikator Kesejahteraan Masyarakat,. Jakarta : Bappenas
- Baswir, 2000. Akuntansi pemerintahan Indonesia. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta
- Dwiyanto Agus. 2005. Menuju good governance melalui pelayanan publik. Yogyakarta Gadjra Mada University Presss. Hal. 189
- Dura, J. (2016). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia, 10(2), 26-32.
- Eko Maulana Ali. 2012. Kepemimpinan Transformasional Dalam Birokrasi Pemerintahan, PT.Multicerdas Publishing, Jakarta.
- Elvina dan Musdhalifah, 2019. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Partisipasi dan Implementasi Kebijakan dengan

- Efektivitas Pembangunan Program Dana Desa Sebagai Variabel Intervening. JSHP 3(1): 1-9.
- Fahri. L. N. 2017. Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa. Jurnal Publik 11(1): 75-88.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Hadari Nawawi. (2005). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Gajah. Mada University Press.
- Hadi, Rifa Rizka. Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat: Study kasus Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Handayani, suci. (2006). Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi. Surakarta Kompip Solo.
- <https://www.pengadaan.web.id/2019/12/transparansi-adalah.html>
- Humanitarian Forum Indonesia (HFI)
- Jauch, Lawrence R. dan William F. Glueck, (1998), "Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan", Edisi ketiga, Erlangga,
- Kartono, Kartini. (2003). Pemimpin dan Kepemimpinan, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kholmi, M. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Jurnal of Innovation in Business and Economics (JIBE) 7(2): 143-152.
- Kristianten, 2014. Akuntabilitas Kinerja Berkonsep Value for Money Pada Instansi Pemerintah. Ekonisia. Yogyakarta
- Kurniawan, Tri Hariono, and David Efendi. "Pengaruh Penggunaan Add, Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat." Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) 8.2 (2019).
- Kuswanti, A. P. E., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Add, Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), 9(2).
- Lombogia, R., Ruru, J. M., & Plangiten, N. (2018). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan di

- Desa Timbukar Kecamatan Sonder. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(50).
- Mahmudi 2013. *Manajemen Sektor Publik*. Edisi kedua UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (3 ed.). Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mildawati dan Sari (2019). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan riset Akuntansi Vol.8 No. 12* <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2732>, 20 Oktober 2021.
- Moejiono, Imam. 2002 *Kepemimpinan dan Keorganisasian*. Jogyakarta. UII Press.
- Mubyarto dkk. 1984. *Nelayan dan Kemiskinan, Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai*. Jakarta :Rajawali
- Muhammad, Hamid. (2007) *Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)*. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
- Nafidah, L.N. dan M. Suryaningtyas. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Bisnis* 3(1):213-239.
- Novitasari, 2019. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Transparansi, Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Nurohman, Y. A., Qurniawati, R. S., & Hasyim, F. (2019). Dana Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro. *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 7(1), 35-43.
- Pangayouw S.E.,M.Si.,Ak dan Kurniawati Yuli (2017). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana kampung, kebijakan kampung dan kelembagaan kampung terhadap kesejahteraan masyarakat (studi pada kampung distrik sentani kabupaten jayapura). *Jurnal akuntansi & keuangan daerah vol 2, no. 2* <http://ejournal.akuntansiuncen.ac.id/index.php/JurnalAkuntansiUncen/article/view/32/26>, 15 Oktober 2020.

- Pasaribu, Kristina. Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Gonting Garoga Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara. Diss. Universitas Medan Area, 2020.
- Peraturan Pemerintah Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Pasal 6 Tahun 2019.
- Peraturan.bpk.go.id. PP No.43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5482>, 20 Oktober 2021.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (n.d.).
- Prayogi, R. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. (Skripsi, universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019) Diakses dari <http://dspace.uui.ac.id>
- Purwanto, Agus, Erwan dan D.R. Sulistyastuti. 2015. Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Gava Media. Yogyakarta.
- Putra, I.M.Y.D. dan N.K. Rasmini. 2019. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. E-Jurnal Akuntansi 28(1): 132-158.
- Raharja, G. P., Herawati, N. T., Purnamawati I G. A. (2015). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Organisasi (Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng). Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, 3(1).
- Rasul, 2012. Pembangunan Ekonomi Desa. Graha Ilmu. Bandung
- Rahmannuddin, M., & Sumardjo. (2018). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan dana Desa Di Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Jawa Barat. Jrnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat, 2(1), 4133-146.
- Ramadhan, T. B. (2021). Kepemimpinan Kepala Desa Periode 2019-2024 Dalam Pemberdayaan Ekonomi Guna Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

- Riza, I. F. (2019). Pengaruh alokasi dana desa (ADD) dan pendapatan asli desa (PADesa) terhadap kesejahteraan masyarakat desa: Studi kasus pada Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Saca Firmansyah. 2009. Partisipasi Masyarakat. Diambil pada 19 Oktober 2021 dari <http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/>.
- Saputra, I. W. 2016. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)* 6(1): 1-10.
- Sari, Ayu Nela. (2018). Pengaruh Penggunaan ADD, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. (Studi Kasus Desa Bejijong Kecamatan Trowulan, Mojokerto). Surabaya : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. 7(5). 2460-0585
- Simbolon, Anthon. 2006. Akuntabilitas Birokrasi Publik. Edisi revisi. Yogyakarta:UGM
- Siti Irine Astuti D. 2009. Desentralisasi dan Partisipasi dalam Pendidikan. Yogyakarta : UNY
- Soetomo. 2014. Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkan dalam Prespektif Masyarakat Lokal Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Solihin, Dadang. (2014). Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan". Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Sugiharto, E. (2007). Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik. *EPP*, Vol.4 , 32-36.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V.W., 2015. Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Syamsi, S. 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3(1) ISSN 2442-6962.
- Tahir Arifin. 2014. Buku Ajar Perilaku Organisasi. Penerbit Deepublish: Yogyakarta.
- Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial
- Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintah
- Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

- undang-undang nomor 72 tahun 2005 tentang desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967. Jakarta.
- Wahyuddin (2016) Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuja Utara. e jurnal katalogis volume 4 nomor 5, mei 2016 ISSN:2302-2019 HAL 141-149.
- Waluyo.2009. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). Bandung : Mandar Maju.
- Widjaja, HAW. 2009. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

